

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Di era globalisasi dan reformasi, tuntutan transparansi publik semakin meningkat. Untuk memenuhi transparansi publik peran akuntansi dibutuhkan, tidak hanya untuk kebutuhan manajemen suatu entitas secara internal tetapi juga untuk kebutuhan pertanggungjawaban (*accountability*) kepada banyak pihak secara eksternal. Sistem transparansi berbasiskan peran akuntansi semakin meningkat ditunjang oleh peran teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat untuk meniai dan membandingkan suatu entitas dengan entitas lain. Untuk itu tuntutan penyediaan informasi termasuk informasi keuangan dan akuntansi menjadi kebutuhan mutlak. Selain perusahaan swasta, peran akuntansi dibutuhkan juga oleh instansi pemerintah, agar pengelolaan keuangan instansi pemerintah semakin baik.

Instansi pemerintah wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut diperlukan penerapan sistem pelaporan keuangan yang tepat, jelas dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Akhir-akhir ini tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah menjadikan pentingnya akuntansi pada pemerintahan. Semakin besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), maka semakin besar pula tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang semakin efektif.

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yaitu dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu yang disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum (Herawati, 2014). Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah merupakan pelaksanaan atas prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Hal ini bertujuan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, standar ini dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD.

Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan yaitu laporan keuangan harus relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan keuangan pemerintah harus memenuhi keempat karakteristik tersebut untuk mencapai tujuannya karena keempat karakteristik itu merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah memenuhi kualitas yang dikehendaki (Budiawan dan Purnomo, 2014).

Berbicara tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah maka yang dibahas adalah sistem pengendalian internal pemerintah. Laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun berdasarkan sistem pengendalian internal (SPI) seperti yang diamanatkan dalam pasal 56 ayat (4) UU nomor 01 tahun 2004 yang menyatakan kepada Organisasi Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD di lingkungan tempat kerjanya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan laporan keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (Herawati, 2014).

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP bisa dijadikan indikator awal dalam menilai kinerja suatu entitas. SPIP merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud) secara dini. Pada kenyataannya, kinerja organisasi seringkali terjadi

penyimpangan dan inefisiensi yang dilakukan aparatur Pemerintahan, dan hal ini berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik dan mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Yunita, 2015).

Kualitas laporan keuangan pemerintah biasanya dinilai dari opini yang diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), (c) kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan (d) efektifitas sistem pengendalian internal (Budiawan dan Purnomo, 2014).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Setiap tahunnya LKPD akan mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Dinyatakan dalam pasal 16 ayat 1 UU nomor 15 tahun 2004, laporan keuangan pemerintah memuat opini

Di dalam melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan, Badan Pengawas Keuangan harus menilai dan menguji SPI pemda yang bersangkutan (Herawati, Tuti, 2014). Terdapat empat opini yang diberikan oleh pemeriksa yakni: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), Tidak Memberi Pendapat (TMP). Pembuatan serta penyajian laporan keuangan pemerintah daerah diwajibkan untuk mengacu SAP sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yunita (2015) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kota Dumai ditemukan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di kota Dumai. Sementara variabel lain yang diteliti Herawati (2014) Organisasi Perangkat Daerah di Cianjur yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil

penelitian yang berbeda dilakukan oleh Budiawan dan Purnomo (2014) terkait sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah wilayah Bogor Jawa Barat.

Dalam penelitian ini obyek kajian dilakukan pada SKPD Kabupaten Nagekeo. Berdasarkan opini BPK Nusa Tenggara Timur pada halaman website Badan Pemeriksa Keuangan Nusa Tenggara Timur di Tahun 2018 Kabupaten Nagekeo mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian. Opini WDP diberikan selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 2012-2017 pada Kabupaten Nagekeo. Terdapat tiga hal yang yang dikecualikan di tahun 2017 yakni: 1) Kas di Bendahara Pengeluaran, terdapat kas di bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan tahun 2017 yang belum dibayar oleh bendahara pengeluaran dan kas unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPT sanggar belajar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena kesalahan pemindaahaan anggaran 2) Kas Dana BOS, saldo dana bos belum dapat diyakini karena pencatatan yang tidak akurat dimana terdapat selisih antara jumlah hasil pengujian pada sekolah dengan data yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2017, 3) Aset Tetap, terdapat kelemahan pengendalian internal atas proses penatausahaan dan penyajian aset tetap yaitu inventarisasi belum dilakukan secara menyeluruh dan hasil inventarisasi yang belum memadai (Badan Pemeriksaan Keuangan, 2018).

Dari hasil pemeriksaan BPK dan opini yang diberikan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo dapat dilihat bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo belum disajikan secara wajar dan berkualitas karena masih adanya pos dan akun yang masih belum disajikan secara wajar. Hal ini juga membuktikan bahwa masih ada faktor-faktor yang memengaruhi sistem pengendalian internal dan penerapan standar akuntansi yang digunakan di Kabupaten Nagekeo.

Adanya opini wajar dengan pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo untuk tahun anggaran 2012 hingga 2018 dilandasi oleh adanya kelemahan dalam penyajian laporan keuangan daerah tersebut yaitu adanya pos dan akun dalam

laporan keuangan daerah belum disajikan secara wajar yang disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya yakni variabel independen dalam penelitian ini yaitu sistem pengendalian internal dan penerapann standar akuntansi pemerintah daerah. Selain dari faktor-faktor tersebut adanya perbedaan hasil penelitian antara peneliti-peneliti terdahulu yang menjadi dasar dilakukannya penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian internal dan penerapann standar akuntansi pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Kabupaten Nagekeo.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Nagekeo?
2. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Nagekeo?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Nagekeo.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Nagekeo.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat akademik:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawa pemahaman serta pengetahuan untuk peneliti berikutnya dalam bidang penyajian laporan keuangan pada sektor publik.

1.4.2 Manfaat praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pelaporan keuangan Kabupaten Nagekeo kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah melalui informasi ini dapat meningkatkan upaya guna peningkatan kualitas laporan keuangan.

1.5 Sistem Penulisan

Bab 1: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi dasar pemikiran yang melatarbelakangi penelitian ini yang digunakan peneliti untuk merumuskan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran umum laporan penelitian ini.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan penjelasan mengenai literatur yang membahas penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian, konsep teoritis yang relevan dengan perumusan masalah, pengembangan hipotesis dan model penelitian.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan metode penelitian yang membahas desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, pengukuran variabel, jenis dan sumber data, populasi sampel, teknik penyampelan, dan analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data, dan pembahasan.

BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisikan simpulan, keterbatasan, serta saran untuk penelitian selanjutnya.